

## **IMPLEMENTASI NILAI KEMANUSIAAN GUNA MENINGKATKAN KEMAMPUAN PHH SATUAN BRIMOB POLDA JABAR**

### ***IMPLEMENTATION OF HUMANITARIAN VALUE TO IMPROVE THE CAPABILITY OF PHH BRIMOB UNDERSTANDING POLDA JABAR***

**Dedi Rahmat**

Program Studi D-3 Kepolisian

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

---

#### **ABSTRAK**

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah situasi dan kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terwujudnya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum juga bentuk-bentuk gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) merupakan salah satu tugas pokok Polri sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diaktualisasikan melalui beberapa bidang tugas seperti kegiatan pre-emptif, preventif dan represif (penegakan hukum) yang semuanya dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Polri.

**Kata kunci:** Satintelkam, Deteksi Dini, Konflik Horizontal

#### **ABSTRACT**

*Community security and order is a dynamic situation and condition of society as a prerequisite for the implementation of a development process in the context of achieving national objectives characterized by security, order and the upholding of law and the realization of peace and ability to develop and develop community potential and strength in preventing, preventing and overcoming all a form of violation of law as well as other forms of disturbance that are disturbing the community. Maintenance of public security and order (Harkamtibmas) is one of the main tasks of the National Police as mandated in Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia which was actualized through several fields of tasks such as pre-emptive, preventive and repressive activities (law enforcement) which were carried out continuously by the National Police.*

**Keywords:** *Satintelkam, Early Detection, Horizontal Conflict*

## Pendahuluan

Berdasarkan Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Satuan Brimob Polda Jabar merupakan satuan pelaksana ditingkat Polda yang memiliki tugas pokok, fungsi dan peran melaksanakan penanganan pengamanan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi antara lain terorisme, huru-hara atau kerusuhan masa, kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api atau bahan peledak, penanganan senjata Kimia, Biologi dan Radioaktif ( KBR ). Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan perannya diharapkan personil Satuan Brimob Polda Jabar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi HAM. Fungsi PHH Brimob Polri dalam pelaksanaan tugasnya sering kali berakhir kerusuhan. Seringkali dalam penanganan kerusuhan pasukan PHH Brimob berhadapan dengan situasi yang susah dikendalikan. Sehingga seringkali dibenturkan dengan masyarakat. Pengenalan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia perlu dilakukan kepada masing-masing personel pasukan PHH Brimob. Karena HAM dapat diartikan sebagai hak dasar manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu gugat atau dicabut oleh manusia. HAM diatur dalam UUD 1945 dan dijamin oleh pemerintah dalam pelaksanaannya. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan sumber nilai bagi HAM . Tanpa nilai kemanusiaan HAM akan mengakibatkan manusia

keluar dari jati dirinya sebagai manusia. Oleh karena itu pengenalan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM perlu dilakukan kepada masing-masing personel PHH Brimob, sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tidak berbenturan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM pada khususnya .

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan perannya agar tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan HAM maka perlu ditekan kembali 4 pilar yang menjadi landasan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ke 4 pilar itu adalah Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Pancasila yang pertama kali diperkenalkan oleh Ir. Soekarno pada sidang I Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945, dirumuskan Pancasila yang telah mengalami perubahan dari yang disampaikan Ir. Soekarno menjadi rumusan dasar negara yang terdiri dari, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>8</sup>

## Metode

8

<http://debiasri.wordpress.com/2012/12/26/sejarah->

[proses-perumusan-pancasila-sebagai-dasar-negara/](http://debiasri.wordpress.com/2012/12/26/sejarah-proses-perumusan-pancasila-sebagai-dasar-negara/) diakses 28 Januari 2014

Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis, data-data yang didapat dijadikan sebagai acuan dengan melakukan kajian kepustakaan.

### **Pendekatan**

Adapun pendekatan dalam menemukan pemecahan masalah, menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti setatus sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

### **Pembahasan**

Kemampuan personil brimob polda Jabar dalam mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan terhadap pelaksanaan tugas pokoknya saat ini dirasakan masih belum optimal. Kultur yang ada belum berubah dari sebelum reformasi polri dan setelah reormasi polri. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh brimob polda Jabar antara lain :

- a. Dalam pelaksanaan tugas masih terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota brimob terhadap pengunjuk rasa.
- b. Dalam pelaksanaan tugas penanganan unjuk rasa masi ada beberapa personil brimob polda Jabar yang membawa amunisi tajam.

Dari beberapa kejadian yang dilakukan oleh personil Brimob Polda Jabar dalam pelaksanaan tugas pengamanan unjuk rasa bahwa personil Brimob lebih mengedepankan kesan arogan dan belum dapat mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalam Pancasila.

Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diketahui situasi eksternal dan internal yang mempengaruhi implementasi nilai-nilai kemanusiaan di satuan brimob Polda Jabar.

### **4. Faktor Internal**

#### **a. Kekuatan**

1) UU No. 2 tahun 2002, pasal 4, yang menegaskan tujuan dari POLRI, yakni mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

a) Adanya rasa tanggung jawab moral pada setiap personel sebagai satuan pemukul Polri yang selalu siap memback up satuan kewilayahan sehingga dibutuhkan suatu kemampuan yang humanis.

b) Adanya Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

#### **b. Kelemahan**

a) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kurang optimal, sehingga lamban dan kurang

responsif dalam setiap pelaksanaan tugas penanganan unjuk rasa .

- b) Kurangnya Pelatihan yang mengedepankan pembentukan karakter bagi masing-masing personel Satuan Brimob Polda Jabar .
- c) Masih adanya sikap represif dalam penanganan unjuk rasa dengan mengedepankan sikap arogan dan kekuatan yang berlebihan dalam menangani unjuk rasa yang ada di masyarakat.

#### **Faktor Eksternal**

##### **Peluang**

- a) Pancasila dan UUD 1945 dapat memperkuat upaya pembentukan karakter yang humanis.
- b) Adanya kepercayaan dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap Satuan Brimob Polda Jabar dalam pelaksanaan tugas pokoknya terutama dalam penanganan unjuk rasa.
- c) Masyarakat masih menaruh kepercayaan dan harapan kepada Brimob untuk membantu dan bersama-sama masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan.

##### **Ancaman**

- a) Adanya kemajuan dibidang teknologi yang sangat pesat dan perkembangan media cetak yang sering kali memberikan pemberitaan yang tidak berimbang mengenai Brimob.
- b) Luasnya wilayah geografis di Satuan Brimob Polda, sehingga dalam penanganan unjuk rasa membutuhkan waktu yang lama.
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan yang kondusif .

#### **Implementasi**

Setiap anggota Brimob dalam melaksanakan kehidupan sehari- hari dan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Timbulnya pelanggaran salah satunya disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman akan arti pentingnya HAM dalam pelaksanaan tugas sebenarnya dilapangan. Oleh sebab itu maka perlunya upaya pendekatan yang tepat dalam mengurangi tindakan yang melanggar HAM sehingga anggota yang melaksanakan tugas dapat meminimalisir tindakan yang dapat merugikan dirinya maupun kesatuan. Dalam menangani unjuk rasa, seringkali personil Brimob berbenturan dengan masyarakat. Sering kali pula penanganan unjuk rasa yang dilakukan dituduh melanggar HAM. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman di setiap personel POLRI, anggota Brimob khususnya mengenai penanganan unjuk rasa yang tidak berbenturan dengan HAM , namun mengedepankan sisi humanis.

Polri kini dituntut lebih bersikap manusiawi dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi dasar negara Indonesia . Nilai-nilai pancasila dan UUD 1945, jika diterapkan dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara akan membuat tatanan kehidupan berjalan dengan baik , sehingga ketertiban dan keamanan masyarakat akan terlaksana. Sesuai dengan reformasi birokrasi POLRI yang lebih mengedepankan pelayanan prima, yang dilandasi transparansi dan akuntabilitas melalui percepatan perubahan mindset dan culture set, dengan metode yang efektif, efisien, tegas dan konsisten. Diharapkan dengan adanya perubahan *mindset* dan *culture set* ,

tercapai perubahan sikap dan pemenuhan pelayanan prima yang diharapkan oleh Polri .

Untuk mencapai pelayanan prima dan perubahan mindset dan culture set yang diharapkan, maka salah satu tugas Polri sebagai pengayom keamanan dan ketertiban masyarakat, perlu adanya pemahaman akan Hak Asasi Manusia dan penerapan nilai-nilai kemanusiaan oleh setiap personel Polri pada umumnya dan personel Brimob pada khususnya .

Salah satu upaya dalam mencegah timbulnya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tugas Brimob adalah memberikan bekal pengetahuan tentang HAM. Cara yang dapat ditempuh salah satunya adalah dengan melakukan pendidikan dan pelatihan. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tidak lepas dari peran instruktur atau tenaga pendidik dalam penyampaian materi. Oleh sebab itu instruktur yang terampil dan terlatih menjadi tonggak awal keberhasilan penyampaian sebuah materi.

### **Metode**

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peranya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat Polri pada umumnya dan brimob pada khususnya harus mengedepankan sikap yang humanis dan selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan agar tidak terjadi benturan dengan masyarakat. Upayakan meminimalisir permasalahan yang muncul melalui beberapa metode :

Memberikan APP sebelum melaksanakan tugas dan Anev pada saat setelah pelaksanaan tugas.

Laksanakan pengawasan melekat oleh pimpinan baik dalam kegiatan sehari-hari ataupun dalam pelaksanaan tugas.

Berikan sosialisai SOP yang ada kepada seluruh personil agar personil dalam pelaksanaan tugas benar-benar paham dan mengerti apa yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas.

Maraknya unjuk rasa yang terjadi di Indonesia, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Satuan Brimob Polda Jabar yang memiliki kemampuan PHH, diharapkan mampu menangani unjuk rasa dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia. Maka diperlukan suatu langkah upaya untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif organisasi, diantaranya adalah

### **Visi**

Mewujudkan kemampuan PHH Satuan Brimob Polda Jabar yang mampu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan mengutamakan Hak Asasi Manusia dalam penanganan unjuk rasa demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

### **Misi**

Untuk mencapai visi, terdapat beberapa misi yang harus dilaksanakan.

Meningkatkan kualitas maupun kuantitas personel Brimob sehingga dapat menangani unjuk rasa dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.

Merumuskan metode yang efektif dalam pelatihan penanganan unjuk rasa

yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.

### **Tujuan**

- a. Terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan penanganan unjuk rasa di satuan Brimob Polda Jabar.
- b. Terwujudnya pasukan PHH yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.

### **Sasaran**

Yang menjadi sasaran dalam mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam penanganan unjuk rasa meliputi :

- a. Peningkatan karakter personel PHH Satuan Brimob Polda Jabar dalam menangani unjuk rasa
- b. Peningkatan latihan PHH yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.

### **Kebijakan**

- a. Menjadikan pasukan PHH Satuan Brimob Polda Jabar mampu menangani unjuk rasa dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan .
- b. Meningkatkan pelatihan HAM bagi personel Brimob guna meningkatkan penanganan unjuk rasa yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM .

### **Strategi**

Jangka pendek (6 bulan )

- a) Meningkatkan pelaksanaan pelatihan kemampuan PHH dengan rutin dan berkesinambungan.
- b) Melakukan pembinaan rohani dan mental bagi personel brimob Satuan Brimob Polda Jabar.
- c) Meningkatkan pembinaan fisik personel Brimob Satuan Brimob Polda Jabar.

Jangka sedang (1 tahun )

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas personel pasukan PHH Satuan Brimob Polda Jabar
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana pasukan PHH .
- c) Meningkatkan penerapan reward and punishment sebagai salah satu upaya meningkatkan motivasi personel.

Jangka panjang (2 tahun )

- a) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral bidang Hak Asasi Manusia.

Semua strategi yang telah disusun dalam jangka waktu tersebut merupakan upaya mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia dalam penanganan unjuk rasa yang terjadi di masyarakat dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi, baik dari internal maupun dari eksternal. Dengan strategi tersebut maka pembinaan personel Brimob Satuan Brimob Polda Jabar dapat optimal sehingga mampu untuk mendukung pelaksanaan tugas Brimob.

### **Upaya/Action Plan (Implementasi Strategi)**

- a. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan kemampuan PHH secara umum dengan rutin dan berkesinambungan dengan upaya :
  - a) Mendatangkan instruktur PHH yang memiliki kemampuan mahir.
  - b) Pelaksanaan pelatihan PHH dilaksanakan rutin setiap bulannya .
  - c) Memberdayakan para Perwira sebagai pengawas pelaksana latihan.
  - d) Melatihkan kemampuan PHH di masing Detasemen yang ada di Satuan Brimob Polda Jabar.
- b. Melakukan pembinaan rohani dan mental bagi personel brimob dengan upaya :
  - a) Melaksanakan program kegiatan keagamaan setiap seminggu sekali.
  - b) Memberikan APP kepada anggota yang dibarengi dengan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan ajaran agama.
- c. Meningkatkan pembinaan fisik personel brimob Satuan Brimob Polda Jabar dengan upaya :
  - a) Melakukan program pembinaan fisik secara rutin sesuai dengan program postur Brimob Polri.
  - b) Melaksanakan latihan beladi Polri dalam satu minggu 2 kali .
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas personel brimob dengan upaya:
  - a) Menerapkan sistem pembinaan personel yang didasarkan pada peningkatan kemampuan personel PHH.
  - b) Meningkatkan pelaksanaan pelatihan mengenai Hak Asasi Manusia dan pembentukan karakter bagi masing-masing personel Brimob Satuan Brimob Jabar.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana PHH, untuk menunjang pelaksanaan penanganan unjuk rasa yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.
- f. Meningkatkan penerapan reward and punishment sebagai salah satu upaya meningkatkan motivasi personel.
  - a) Menyusun piranti lunak menyangkut kriteria untuk pemberian penghargaan dan hukuman kepada personel brimob.
  - b) Melakukan pendataan bagi anggota yang berprestasi dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik untuk diberikan *reward* dan menjatuhkan hukuman kepada anggota yang melanggar ketentuan yang berlaku melalui sidang disiplin atau sidang kode etik.
- g. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral bidang pelatihan Hak Asasi Manusia kepada personel brimob Satuan Brimob Polda Jabar.

### **Kesimpulan**

- a. Implementasi nilai-nilai kemanusiaan di Satuan Brimob Polda Jabar dalam melaksanakan tugas pokoknya saat ini dirasakan belum optimal, hal tersebut ditandai dengan masih adanya perilaku personil Brimob Polda Jabar yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan tidak mematuhi SOP yang sudah ada di Satuan Brimob Polda Jabar.
- b. Metode yang diterapkan dalam peningkatan kemampuan PHH brimob hanya sebatas melaksanakan kegiatan rutin yang sifatnya melakukan latihan-latihan lapangan tanpa menekankan

pada aspek nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga dalam pelaksanaan tugas pokoknya masih terkesan militeristik.

### **Rekomendasi**

Agar dalam pelaksanaan tugas penanganan unjuk rasa diperlukan pemahaman dari masing-masing personel Satuan Brimob Polda Jabar mengenai hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan, Sehingga dalam penanganan unjuk rasa dapat dilakukan dengan humanis dan mengedepankan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan bukan dengan tindakan represif. Hal ini sesuai dengan perubahan paradigma baru kepolisian yang mengedepankan perubahan culture set dan mind set kepolisian menuju kepolisian yang yang lebih mengedepankan pelayanan prima, yang dilandasi transparansi dan akuntabilitas.

a. Menerapkan metode yang tepat dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM dalam penanganan unjuk rasa meliputi:

- 1) Mengadakan kerjasama lintas sektoral bidang pelatihan Hak Asasi Manusia dengan instansi terkait.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan pelatihan PHH di lingkungan internal Satuan Brimob Polda Jabar secara umum dengan rutin dan berkesinambungan.
- 3) Menerapkan reward and punishment sebagai salah satu

upaya untuk meningkatkan motivasi personel.

- 4) Melakukan pembinaan rohani dan mental bagi personel brimob Satuan Brimob Polda Jabar.
- 5) Melakukan pelatihan mengenai HAM kepada masing-masing personel Brimob Satuan Brimob Polda Jabar , sehingga dalam pelaksanaan penanganan unjuk rasa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.

Demikian Naskah Karya Perorangan ini disusun dengan segala kemampuan dan keterbatasan pengetahuan, referensi, waktu dan pengalaman pasis, namun demikian merupakan usaha yang maksimal. Harapan pasis semoga dapat dijadikan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan langkah-langkah dan kebijakan bagi pimpinan dan rekan-rekan dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia dalam penanganan unjuk rasa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Undang Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negar Republik Indonesia